

OMBUDSMAN KALSEL LAKUKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA BANJARMASIN

Kamis, 11 Mei 2023 - Ita Wijayanti

Banjarmasin-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi kelembagaan dengan mengunjungi Universitas Lambung Mangkurat terkait program dan kerjasama yang akan dijalin pada Rabu (10/05/2022). Tujuan kunjungan tersebut dilaksanakan untuk kerjasama dalam bidang Pencegahan Maladministrasi, sosialisasi serta jaring laporan masyarakat.

Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Muhammad Firhansyah menyampaikan bahwa Ombudsman RI Kalimantan Selatan memiliki MoU dengan Universitas Lambung Mangkurat, yang isinya selain melakukan pencegahan Maladministrasi juga kami menerima mahasiswa/i magang dari Universitas Lambung Mangkurat setiap tahunnya. Selain itu, kami berkolaborasi dengan keasistenan bidang Pencegahan Maladministrasi untuk melakukan program-program sosialisasi seperti Ombudsman *Goes To Campus*, Ombudsman Mendengar dan Penerimaan Laporan Masyarakat dari para pengguna layanan yaitu para mahasiswa/i. "Sebenarnya sudah lama ingin kami lakukan kegiatan sosialisasi ini kembali, namun di tahun-tahun kebelakang kami tunda, karena pandemi dan di tahun ini rencananya akan kami agendakan kembali. Untuk ke depannya kami akan banyak koordinasi dengan Universitas, karena permasalahan pelayanan publik semakin variatif, selain kami akan belajar dengan pakarnya, kami juga ingin mengundang ahli di tempat kami untuk permasalahan-permasalahan tertentu," ujar Firhansyah.

Menanggapi hal tersebut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Budi Suryadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari Ombudsman RI Kalimantan Selatan, pihak kampus mendukung program-program yang akan dilaksanakan untuk kemajuan mahasiswa/i dalam bidang ilmu. "Kami siapkan ruang untuk sosialisasi dan menghadirkan mahasiswa dalam agenda tersebut. Rencana dan harapan kedepan yaitu kami berupaya untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), karena itu kami perlu bimbingan dari Ombudsman RI Kalimantan Selatan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Budi.

Turut hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof Budi Suryadi, Wakil Dekan Fakultas Hukum Dr. Suprpto, Asisten Bidang Penerimaan Laporan Rujalinor dan Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Wildan Fauzi Muchlis.